

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada penyebarluasan Perda tersebut sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi penyusunan rancangan peraturan daerah ini yang merancang adalah dari pihak eksekutif dan Raperda-Raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada Prolegda.
2. Dari jumlah Ranperda yang diusulkan oleh pihak Pemerintah Daerah mulai dari Tahun 2010-2014 sebanyak 32, Perda tersebut adalah Inisiatif Pemerintah Daerah, sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri tidak ada. Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD Kabupaten Pulau Morotai semuanya diterima dan tidak ada yang ditolak oleh DPRD, bahkan Perda tersebut telah menjadi Perda Kabupaten Pulau Morotai saat ini.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah ini antara lain: Sumber daya manusia, Data atau informasi, dan Pengalaman oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

6.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran agar pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat berjalan dengan lebih baik antara lain:

1. Sebaiknya DPRD Kabupaten Pulau Morotai harus membentuk Panitia Legislasi yang lebih dan harus memahami kinerjanya selaku badan pembuat peraturan daerah.
2. Sebaiknya DPRD Kabupaten Pulau Morotai selalu intens berkordinasi dengan pihak eksekutif dalam artian untuk mengetahui apa saja yang diperlukan sehingga dapat dimanifestasikan dalam bentuk peraturan daerah.
3. Perekrutan calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan oleh Partai Politik harus didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal sehingga anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi legislasi.